

## Wanita di Bogor Hilang Terbawa Arus Sungai Cibadak Bogor

**BOGOR (IM)** - Wanita berusia 50 tahun bernama Empat, hilang terbawa arus Sungai Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Korban terbawa arus karena diduga terpeleset saat hendak menyeberang sungai.

“Polsek Tanjungsari mendapatkan Laporan dari warga masyarakat di mana adanya orang yang hanyut di aliran sungai Cibadak yang sangat deras, di mana anggota piket yang mendapatkan laporan tersebut telah melakukan cek TKP kejadian orang hanyut terbawa arus sungai Cibadak tersebut,” kata Kapolsek Tanjungsari Iptu Rustami, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Rustami menjelaskan, peristiwa itu terjadi pagi tadi sekitar pukul 06.09 WIB. Saat kejadian, korban bersama sang suami, Jumhi (60) hendak menyeberangi Sungai Cibadak menuju ladangnya untuk bertani.

Rustami menjelaskan kronologis adanya orang hanyut dari laporan dan keterangan warga.

Rustami mengatakan korban dan suaminya menyeberang sungai saat berangkat ke sawah. Namun, korban terpeleset, suami korban sempat menarik korban, tetapi tidak tertahan hingga akhirnya korban terbawa arus sungai.

“Korban bersama suami, bapak Jumhi (60), hendak berangkat ke sawah, kemudian menyeberang sungai Cibadak yang kondisi air deras. Lalu kemudian saat menyeberang Sungai Cibadak korban terpeleset, lalu ditarik oleh suami, korban tidak tertahan dan terbawa arus sungai Cibadak,” terangnya.

Hingga Kamis siang, pihak tim SAR gabungan dari BPBD, Damkar Kabupaten Bogor, relawan, kepolisian dan warga masih menyalisir Sungai Cibadak untuk mencari keberadaan korban.

“Sampai saat ini pihak Polsek Tanjungsari bersama instansi terkait lainnya bersama warga masyarakat Cibadak, sudah berkoordinasi dengan Basarnas juga, secara bergotong royong dibantu warga, saat ini masih dalam pencarian,” kata Rustami. ● **gio**



### UMKM SAMBAL KEMASAN TANGSEL TEMBUS PASAR LUAR NEGERI

Pekerja mengemas produk sambal di industri rumahan Sambal Haji Lina, Serpong, Tangsel, Banten, Kamis (14/3). Industri rumahan tersebut memproduksi sambal kecombrang, bawang, daging bebek dan ikan tuna seharga Rp30 - 40 ribu yang dipasarkan ke sejumlah pusat perbelanjaan hingga Jerman, Malaysia dan Singapura yang mampu terjual sampai dua ribu kemasan per bulannya.

## Pemprov Banten Sediakan 38 Bus Mudik Gratis di Ramadhan 2024

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, ada 38 bus dengan kuota 1.710 kursi yang disediakan untuk mudik gratis pada momentum Idul Fitri tahun 2024 ini.

**SERANG (IM)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyediakan mudik gratis pada momentum Ramadhan 2024. Hal itu untuk membantu masyarakat yang hendak bersilaturahmi dengan keluarga.

Program mudik gratis ini diadakan tak hanya dari wilayah Banten. Namun ada juga yang berangkat dari luar Banten.

Mudik gratis itu memiliki tujuan di empat provinsi. Di antaranya Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Banyumas (Purwokerto), Kota Brebes, Kota Semarang dan Kota Surakarta (Solo).

Kemudian Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat adalah Garut, Kota Tasikmalaya dan Kota Cirebon. Serta Provinsi Sumatera Selatan ke Kota Palembang.

Sedangkan pemberangkatan dari luar provinsi menuju Banten, disediakan dari tiga daerah. Di antaranya, Jakarta meliputi asal pemberangkatan dari Kalideres dan Tanjungpriok.

Selanjutnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta pemberangkatan dari Kota Yog-

yakarta. Sementara dari Jabar, pemberangkatan dari Kota Bandung dan Kota Bogor.

Dari catatan Dishub Banten pada Kamis (14/4) pukul 12.30 WIB, pemberangkatan dari dalam Banten ke provinsi tujuan kuotanya sudah habis.

Sementara pemberangkatan dari luar Banten, masih banyak menyisakan kuota, seperti Kalideres ada 213 kursi, Tanjung Priok 220 kursi, Yogyakarta 1 kursi, Kota Bandung 8 kursi, dan Kota Bogor 85 kursi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, ada 38 bus dengan kuota 1.710 kursi yang disediakan untuk mudik gratis pada momentum Idul Fitri tahun 2024.

“Ada 38 bus dikalangan 45 kursi, seingat saya 1.710 kursi,” katanya, Kamis (14/3).

Ia menerangkan, pembukaan pendaftaran mudik gratis sudah dibuka sejak 10 Maret 2024. Rencananya, pemberangkatan diagendakan pada 6 April 2024.

“Rencananya tanggal 6 April (pemberangkatan), mudah-mudahan tidak ada informasi apapun dari pusat

ya karena kita harus akomodir kalau ada perubahan cuti bersama lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat yang antusias berangkat dengan kota tujuan Solo dan Yogyakarta. Pada saat hari pertama pendaftaran, kuotanya langsung habis.

“Kami menyediakan Jogja 4 bus, Solo 4 bus itu habis langsung, hari itu juga habis,” jelasnya.

Ia menerangkan, saat ini Dishub sedang menjajakan komunikasi untuk pemberangkatan dari luar Banten dengan berbagai komunitas.

Mengingat kuotanya masih tersisa banyak.

“Kalau kami Jakarta dari Kalideres 5 bus, Tanjung Priok 5 bus, tapi pendaftarannya masih sedikit, mungkin harus komunikasi lagi sama teman-teman di Jakarta,” terangnya. ● **pra**

## DPKPP: Heha Waterfall Tidak Miliki Sertifikat Laik Fungsi

**BOGOR (IM)** - Walaupun sudah mengantongi rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejak Bulan Januari Tahun 2024, ternyata objek wisata Heha Waterfall yang sudah beroperasi sejak Bulan Oktober Tahun 2023 tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Mereka sudah mengantongi rekomendasi PBG, namun objek wisata Heha Waterfall belum memiliki SLF,” kata Kabid Penataan Kawasan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Riza Juangrah Rahmat kepada wartawan, Kamis (14/3).

Riza Juangrah Rahmat pun meminta pengelola objek wisata Heha Waterfall yang berlokasi di Kampung Baru Jalan Kapten Harun Kabir RT 003 RW 004 Desa Cibeureum, Cisarua untuk melengkapinya dengan SLF.

“Kami akan meminta mereka untuk mengurus SLF, jangan sampai ada bangunan atau gedung yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk apakah gambar site plan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan,” pinta Riza Juangrah Rahmat.

Ia menuturkan bagi pengelola atau pemilik bangunan yang lokasinya di tebingan atau potensi rawan bencana tanah longsor, banjir dan lainnya, seharusnya melakukan rekayasa teknik terutama dari struktur bangunan.

“Harus ada rekayasa teknik struktur bangunan untuk mengantisipasi lereng atau tebingan, hingga memperkecil dampak resiko potensi kebencanaan dan menghindari adanya korban luka maupun jiwa,” tuturnya.

Sebelumnya, BPBD Kabupaten Bogor menyebut bahwa objek wisata Heha Waterfall ternyata tidak memiliki

kajian kebencanaan.

“Setelah saya cek tidak ada kajian kebencanaan terkait obyek wisata Heha waterfall,” ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Agus Suyatna.

Agus Suyatna menerangkan bahwa kepemilikan kajian kebencanaan merupakan salah satu syarat terbitnya izin usaha kepariwisataan.

“Selain kajian kebencanaan, pengelola objek wisata juga diwajibkan memiliki rambu dan jalur evakuasi. Agar mencegah kejadian serupa, kami akan buat surat edaran dan sebar ke pengelola objek wisata,” terang Agus Suyatna.

Sebelumnya, pada Senin, 11 Maret kemarin, dua orang karyawan Heha Waterfall mengalami luka berat akibat tertimpa dan tertimbun material bencana tanah longsor. ● **gio**

## BPBD Lebak Imbau Pengendara Motor Tidak Berteduh di Bawah Pohon

**LEBAK (IM)** - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak memberikan imbauan kepada pengendara motor untuk tidak berteduh di bawah pohon.

Imbauan tersebut untuk menghindari bahaya dampak hujan deras disertai angin kencang.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama menyampaikan, imbauan tersebut karena dampak cuaca ekstrem yang saat ini terjadi selama Maret 2024.

“Tidak dianjurkan untuk meneduh di bawah pohon pada saat angin kencang dan petir,” kata Febby, Kamis (14/3).

Diungkapkan Febby, sebelumnya dampak angin kencang juga merusak 45 rumah di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak pada 12 Maret 2024. Saat ini, relawan BPBD di 28 kecamatan terus melakukan penanganan.

“Untuk tetap siaga waspada karena jika kembali turun hujan akan berpotensi banjir di wilayah tersebut,” ujar Febby.

Rawannya cuaca ekstrem

bagi pengendara motor, karena bahaya pohon yang tumbang.

Selain itu untuk pengendara tetap berhati-hati saat berkendara di wilayah yang banyak pohon besar.

Dari data BPBD Lebak dalam kejadian hujan disertai angin kencang, tidak ada korban jiwa dan luka.

Namun, mengakibatkan kerusakan berupa rumah dan infrastruktur.

Lebih lanjut, Febby menyebutkan, untuk warga yang berada di kawasan rawan longsor tetap waspada dan siaga dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini.

“Untuk masyarakat yang berpotensi longsor di wilayahnya jika hujan deras kembali melanda, diimbau untuk mencari tempat yang aman agar tidak ada korban jiwa,” jelasnya.

Nela, warga Kecamatan Bayah, berharap kondisi cuaca di wilayah Lebak Selatan dalam kondisi baik.

“Hujan deras masih terjadi karena dampak cuaca ekstrem ya. Saat ini kami juga terus waspada, karena sebelumnya warga di sini terdampak banjir dan angin kencang,” pungkasnya. ● **pra**

## Aktivitas Tambang Ancam Lahan Pertanian Warga

**BALANGAN (IM)** - Aktivitas tambang ilegal masih marak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Balangan, tambang batubara yang diduga ilegal dilakukan warga Desa Lingsir, Kecamatan Paringin Selatan, karena merusak jalan desa dan areal pertanian warga.

Dariv informasi yang dihimpun, tambang batubara yang berada di wilayah Desa Lingsir dan Kaladan ini sudah berlangsung cukup lama.

Sejumlah warga mengeluhkan rusaknya jalan desa akibat angkutan hasil tambang, serta menurunnya kualitas air yang mengairi persawahan warga.

“Jalan rusak dan berdebu, air yang mengairi sawah kami berubah menjadi kehitaman dan dikhawatirkan dapat mengganggu produksi padi maupun tanaman pertanian lainnya,” ungkap salah seorang warga desa.

Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Balangan, Ilmi, menyebut sejauh ini belum ada laporan terkait kerusakan lahan pertanian akibat tambang dimaksud.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa muncul aktivitas tambang di daerah yang dekat dengan perkotaan. Hal ini tidak lepas dari adanya masyarakat yang menjual tanahnya ke penambang. Di

sisi lain jika tidak ada aparat yang mengizinkan maka tidak mungkin terjadi pertambangan,” tegasnya.

Pihak Polres Balangan mengaku telah menerima laporan dan masih melakukan penyelidikan tentang adanya aktivitas tambang batubara diduga ilegal di Desa Lingsir dan Kalaan tersebut.

Masih maraknya aktivitas tambang ilegal di Kalsel ini menjadi sorotan dari organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel, terkait maraknya aktivitas tambang ilegal ini.

“Tambang ilegal ini masalah klasik yang terus muncul. Pemerintah dan aparat seolah abai. Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami, tentang komitmen mereka,” tegas Kisworo beberapa waktu lalu.

Menurut catatan Walhi Kalsel, praktek tambang batubara ilegal ini muncul di sejumlah wilayah Kalsel, bahkan bersinggungan dengan kawasan hutan Pegunungan Meratus, permukiman penduduk, sekolah, jalan negara termasuk kawasan wisata.

Aktivitas tambang baik legal apalagi ilegal menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. ● **pra**

## DPRD Jabar Terima Kunjungan Kerja DPRD Bengkulu



**BANDUNG (IM)** - DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Kunjungan kerja tersebut terkait studi tiru penganggaran alokasi dana pada program Kementerian Sosial dan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar dan soal sinergi pelayanan penyandang disabilitas.

Studi tiru tersebut diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Iman Tohidin di ruang Komisi V DPRD

Jawa Barat. “DPRD Provinsi Bengkulu studi tiru ke DPRD Jawa Barat untuk melihat bagaimana penanganan disabilitas di Provinsi Jabar. Tentunya, dengan kunjungan kerja ini kita bisa berbagi informasi, berdiskusi, berbagi pengalaman penanganan disabilitas antara Provinsi Bengkulu dengan Jabar,” jelas Iman Tohidin, Kota Bandung, Kamis (14/3).

Untuk Jawa Barat lanjut Iman Tohidin, penanganan disabilitas menjadi kewenangan Dinas Sosial Jabar. Dalam pertemuan tadi berdiskusi banyak soal penanganan disabilitas an-

tara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Dinsos Jabar.

Dalam pertemuan juga disinggung soal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang akan segera diganti dengan Perda yang baru, dan Perda tersebut diinisiasi oleh Komisi V DPRD Jawa Barat.

Kita memaklumi bahwa Perda yang mengatur disabilitas ini terakhir di tahun 2013, dan sekarang alhamdulillah Komisi V DPRD Jawa Barat

sedang menyusun Raperda baru.

Raperda bagaimana aturan ini akan memberikan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jabar, kata dia. Di samping itu dibahas juga soal kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar yang mewajibkan perusahaan memperkerjakan sebesar 1% dari penyandang disabilitas, dan kebijakan ini disambut positif oleh DPRD Provinsi Bengkulu.

Di tempat yang sama Ketua

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan studi tiru ke DPRD Jawa Barat. Pertama ingin mendalami Perda terkait disabilitas.

Kedua soal akses publik bagi disabilitas, ketiga terkait alokasi dana pada program Kemensos.

“Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar agar mendapatkan anggaran dari program Kemensos,” tanya Edwar Samsi. ● **lys**

